



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DUSUN PPN JAYA DESA USAR  
KECAMATAN PLAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang:
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Kuang Busir Desa Usar Kecamatan Plampang serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Usar Kecamatan Plampang;
  - b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Usar Kecamatan Plampang telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Usar Nomor : 2.2 /1284 / XII / 2020 tanggal 28 Nopember 2022, perihal Usulan Pemekaran Dusun Pamunga dan Dusun Kuang Busir Desa Usar Kecamatan Plampang;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Kuang Busir memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun PPN Jaya Desa Usar Kecamatan Plampang;

XPLK

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155 );
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55 ).

XPK

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN  
PPN JAYA DESA USAR KECAMATAN PLAMPANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

### **BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

XPL

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN DUSUN**  
**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun PPN Jaya yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Kuang Busir Desa Usar Kecamatan Plampang.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun PPN Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Usar Kecamatan Plampang terdiri atas 7 (tujuh) Dusun yaitu:
  - a. Dusun Usar;
  - b. Dusun Pamunga;
  - c. Dusun Kuang Busir;
  - d. Dusun Bukit Gratak;
  - e. Dusun Prode Loka;
  - f. Dusun Olat Rora; dan
  - g. PPN Jaya

**BAB IV**  
**LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN**  
**Pasal 4**

- (1) Luas wilayah Dusun Usar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 276 Ha ( Dua ratus tujuh puluh enam Hektar ) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Plampang dan Desa Sepayung;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun PPN Jaya;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pamunga; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepayung
- (2) Luas wilayah Dusun Pamunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 344 Ha ( Tiga ratus empat puluh empat Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Usar;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun PPN Jaya dan Dusun Olat Rora;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Olat Rora dan Desa Prode SP. III; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Spayung

(3) Luas Wilayah Dusun Kuang Busir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 880 Ha ( delapan ratus delapan puluh Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Plampang;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepakat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Prode Loka; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun PPN Jaya

(4) Luas Wilayah Dusun Bukit Gratak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 360 Ha ( tiga ratus enam puluh Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Pamunga;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kuang Busir dan Dusun Prode Loka;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Prode Loka, Desa Prode SP.II dan Desa Prode SP.III; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pamunga

(5) Luas Wilayah Dusun Prode Loka, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 556 Ha ( Lima ratus lima puluh enam Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kuang Busir;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepakat;
- c. sebelah Selatan dengan Desa Prode SP.II; dan
- d. sebelah Timur dengan Dusun Bukit Gratak

(6) Dusun Olat Rora, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Pamunga;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Bukit Gratak;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Prode SP.III; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pamunga

(7) Dusun PPN Jaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Usar dan Desa Plampang;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kuang Busir;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Prode Loka; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Usar, Dusun Pamunga dan Dusun Bukit Gratak

### Pasal 5

(1) Titik koordinat Dusun PPN Jaya hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.784863  
E. 117.805210
- b. S. 08.796978  
E. 117.809911
- c. S. 08.800470  
E. 117.813362
- d. S. 08.794368  
E. 117.824429

## BAB. IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun PPN Jaya Desa Usar, Kepala Desa Usar mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Usar dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 128

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 128 TAHUN 2022**  
**TENTANG  
PEMBENTUKAN DUSUN PPN JAYA DESA USAR  
KECAMATAN PLAMPANG**

**I. UMUM**

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 95 TAHUN  
2022**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR: 128 TAHUN 2022

